

Budaya Kewargaan

by Mappiasse Sulaiman

Submission date: 08-Jun-2022 05:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1852538013

File name: Budaya Kewargaan-Istiqro_Volume 16, Nomor 01, 2018.pdf (733.42K)

Word count: 4939

Character count: 32948

BUDAYA KEWARGAAN MASYARAKAT KELAS MENENGAH MUSLIM DAN KRISTEN DALAM KONTEKS REVOLUSI MENTAL DI SULAWESI

Sulaiman Mappiasse, Nasruddin Yusuf dan Muliadi Nur
Institut Agama Islam Negeri Manado

Meskipun masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat religius, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering menemui kebiasaan yang kurang baik dalam perspektif budaya kewargaan atau moralitas publik, seperti kurangnya budaya antri, tingginya kebiasaan buang sampah bukan pada tempatnya, dan kurangnya sikap tertib serta menghargai satu sama lain dalam penggunaan jalan raya. Penelitian ini berusaha melihat indeks budaya kewargaan kelas menengah Muslim dan Kristen, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi mendorong penguatan budaya kewargaan, dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan tingkat budaya kewargaan di Sulawesi. Penelitian ini dilakukan di empat ibu kota provinsi di Sulawesi, yaitu Kota Manado, Gorontalo, Palu dan Makassar dengan jumlah sampel 460 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tingkat budaya kewargaan masyarakat Muslim dan Kristen di Sulawesi cenderung berada pada tingkat sedang, baik di kalangan masyarakat kelas menengah Muslim maupun Kristen. Tiga faktor utama yang dapat membantu memprediksi tinggi rendahnya tingkat budaya kewargaan, yaitu tingkat keberagamaan, status kelas sosial menengah baru atau lama, dan tingkat pendidikan. Terakhir, penelitian ini membawa implikasi bahwa agama, Islam atau Kristen, saja tidak cukup signifikan memberi dampak pada tingkat kualitas budaya

kewargaan masyarakat. Adalah karakteristik keberagamaan masyarakat yang dibentuk melalui proses pendidikan yang menentukan apakah agama memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas budaya kewargaan atau tidak.

Pendahuluan

Pasca reformasi politik dan ekonomi di tahun 1997/98, Indonesia secara fundamental melakukan reformasi institusi negara guna menguatkan demokrasi dan ekonomi. Melalui proses tersebut, kualitas demokrasi dan ekonomi kita secara kelembagaan mengalami kemajuan signifikan. Namun demikian, kondisi moralitas publik kita masih memiliki berbagai persoalan sehingga revolusi mental diperlukan.

Kebutuhan ini dijawab oleh pemerintahan presiden Joko Widodo dengan program nasional revolusi mental yang menekankan pentingnya penguatan tiga pilar utama mental kebangsaan, yaitu integritas, etos kerja, dan kegotongroyongan. Diharapkan, melalui program ini sebuah budaya bangsa di mana setiap warganya mampu menunjukkan nilai-nilai kewargaan (*civility*) berkualitas dalam interaksi sosial sehari-hari dapat tercipta. Ketiga pilar tersebut dimaknai sebagai representasi esensi budaya kewargaan rakyat Indonesia (Gerakan Nasional Revolusi Mental, 2015).

Pilar nilai budaya kewargaan seperti ini seharusnya dapat disaksikan dalam interaksi sosial setiap warga sebuah bangsa dan Negara, sebab kewarganegaraan adalah posisi atau status resmi yang melekat pada diri setiap warga negara dalam situasi formal maupun informal. Posisi dan status ini memiliki konsekuensi politik yang mengikat, termanifestasikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang seimbang dalam relasi sosial satu dengan yang lain, baik sebagai aparatur negara atau pun sebagai rakyat biasa, atau sebagai orang yang memerintah maupun sebagai orang yang diperintah (Gunsteren, 1998).

Terlebih lagi, apabila kita mengingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia berafiliasi dengan salah satu agama besar dunia, dengan angka mayoritas beragama Islam. Modal sosial dan budaya keberagamaan seperti ini, jika berfungsi optimal, seharusnya melahirkan warga masyarakat yang memiliki integritas kewarganegaraan berkualitas tinggi, sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju (Levitt, 2008; Williams, 1996). Integritas seperti itu idealnya diperkuat dengan nilai-nilai kewargaan (*civility*) yang baik. Ditambah lagi, pertumbuhan ekonomi dalam dekade terakhir telah mendorong lahirnya dan semakin besarnya kuantitas kelas menengah Indonesia (Klinken & Berenschot, 2014; The Economist, 2009).

Kewargaan dan keberagamaan merupakan modal penting bagi pembangunan bangsa Indonesia. Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan ikatan hak, sosial, dan politik yang mendasari keberadaan seseorang sebagai warga negara (*citizen*) sebagai konsekuensi dari status kewarganegaraan (*citizenship*) yang dimilikinya (Gunsteren, 1998) dalam sebuah negara. Kewargaan (*civicness*) penting dimiliki seorang warga negara untuk dapat menjalankan fungsi politik dan sosial dalam kerangka hubungan antar warga dan negara di ranah publik.

Untuk mewujudkan masyarakat berperadaban tinggi tidak cukup hanya dengan menekankan pada aspek kewargaan dan kewarganegaraan, yakni hubungan politik antara warga dan negara serta institusinya, atau hubungan warga dengan warga dalam kontrol dan koordinasi institusi politik, tetapi harus ditopang dengan penguatan budaya kewargaan (*civility*).

Kajian pustaka menunjukkan bahwa sebagian besar studi terdahulu masih terfokus pada kewargaan dan penguatan demokrasi serta peran agama dan kelas menengah dalam konteks masyarakat Barat di ranah penguatan pemerintahan demokratis.

Kelas menengah merupakan status sosial masyarakat yang senantiasa memainkan peran penting dalam perubahan politik

dan sosial sebuah bangsa. Terlepas dari kontroversi peran signifikan kelas menengah Indonesia (Heryanto & Mandal, 2003; Robison, 1990), pengalaman negara-negara maju baik di Amerika, Eropa, maupun di Asia Timur (Koo, 1991) menunjukkan bahwa kelas menengah adalah lokomotif penggerak transformasi politik, ekonomi dan budaya sebuah bangsa. Mereka adalah anggota masyarakat yang mengidealkan dan mengaspirasikan budaya kewargaan yang berkualitas. Karena itu, mereka mampu mendorong terjadinya transformasi politik yang mengarah pada penguatan kualitas dan daya saing bangsa.

Di sisi lain, kajian kewargaan dan kewarganegaraan masih didominasi oleh wacana dan konteks Barat di mana variabel-variabel kajiannya masih merepresentasikan agenda nasional dan imajinasi intelektual mereka, seperti yang dilakukan Inglehart (1988), dan Dalton dan Welzel (2014). Di samping itu, penelitian mereka hanya terfokus pada hubungan warga dengan negara serta institusinya dalam konteks *citizenship*; belum menyentuh hubungan antar warga dan warga dalam konteks *civil society*. Lebih jauh lagi, ide-ide liberal rasionalis cenderung menjauhkan ide-ide alternatif yang berbasis budaya-agama lokal Indonesia.

Kajian orang Indonesia yang ada pun masih terbatas pada wacana peran kelas menengah dalam konteks organisasi formal dan politik praktis. Padahal, penguatan budaya kewargaan (*civility*) disamping kewargaan (*civicness*) tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan masyarakat madani.

Tetapi saat ini, adanya keberagamaan maupun keberadaan kelas menengah yang semakin meningkat belum mampu secara signifikan melahirkan manusia-manusia Indonesia yang memiliki kompetensi dan budaya kewargaan berkualitas tinggi. Perilaku kewargaan sehari-hari mereka belum secara signifikan menunjukkan arah yang berbanding lurus dengan fungsi sosial keberagamaan dan peran keberadaan kelas menengah yang

diharapkan. Budaya keberagamaan dan eksistensi kelas menengah belum melahirkan budaya kewargaan yang membanggakan. Di mana-mana, kita masih menyaksikan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai utama budaya kewargaan, seperti buang sampah di sembarang tempat, tidak tertib antri, dan tidak disiplin dalam penggunaan waktu dan jalan.

Fokus penelitian ini ingin mengidentifikasi indeks budaya kewargaan masyarakat kelas menengah Muslim dan Kristen di Sulawesi secara lebih sistematis, serta memahami berbagai faktor yang dapat berpengaruh pada tinggi rendahnya kualitas budaya kewargaan mereka.

Mengapa pada masyarakat beragama kelas menengah? Karena kelompok sosial ini memiliki potensi dan kapasitas lebih baik untuk menggerakkan proses transformasi sosial. Tetapi pada saat yang bersamaan, mereka juga berpotensi menghambatnya.

Subyek penelitian ini adalah masyarakat kelas menengah dari kalangan Muslim dan Kristen di 4 kota besar di Sulawesi, yaitu Manado, Gorontalo, Palu, dan Makassar. Populasi penelitian ini adalah masyarakat kota dengan asumsi bahwa sebagian besar masyarakat kelas menengah terkonsentrasi di kota-kota besar. Disamping itu, masyarakat kota adalah masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi, sosial dan budaya serta simbolis untuk merepresentasikan fenomena budaya kewargaan dan keagamaan Indonesia. Ini tidak berarti bahwa masyarakat desa tidak memiliki peran dalam ranah publik politik Indonesia.

Penelitian ini merupakan tahap awal dari sebuah proyek penelitian dasar (fundamental) yang bertujuan untuk memahami peran agama dan kelas sosial dalam pembentukan masyarakat madani (*civil society*) yang lebih bermartabat, dan memahami mengapa Indonesia tidak dapat menyelaraskan antara kemajuan dalam pengembangan institusi negara dan politik (*civicness*) dan kemajuan budaya kewargaan (*civility*)

masyarakatnya seperti negara-negara lain, misalnya Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.

Definisi Kewargaan dan Kewarganegaraan

Marshall (1950) menjelaskan bahwa kewarganegaraan memiliki tiga elemen dasar, yaitu kewargaan (*civicness*), politik, dan sosial. Seseorang yang menjadi warga negara dari sebuah negara-bangsa memiliki kontrak kewargaan, politik, dan sosial.

Kewarganegaraan sebagai ikatan politik, dalam beberapa dekade terakhir, semakin berkembang sejalan dengan kompleksitas sosial dan politik yang semakin meningkat. Gunsteren (1998) menegaskan bahwa kondisi sosial yang semakin kompleks dan plural berakibat pada pergeseran karakter kewarganegaraan, dari monolitik menjadi pluralistik. Seseorang di era sekarang dapat memiliki beberapa afiliasi kewarganegaraan atau identitas.

Budaya kewargaan yang terkait dengan keadaban sebuah bangsa disebut dengan etiket (*civility of etiquette*), dan yang terkait dengan budaya asosiasi warga negara, disebut dengan budaya kewargaan liberal (*liberal civility*). Yang pertama didasarkan pada pertimbangan norma dan kesopanan dalam masyarakat adab (*polite society*), sedangkan yang kedua didasarkan pada nalar publik (Meyer, 2000). Evers (2009) menegaskan bahwa budaya kewargaan (*civility*) merupakan aksi kolektif warga negara yang tidak banyak terkait dengan institusi negara, tetapi lebih pada bentuk-bentuk perilaku dan sikap saling menghargai dalam sebuah masyarakat plural di mana orang-orang yang saling tidak mengenal, bahkan mungkin terlibat dalam konflik, saling bergantung dan menghargai satu sama lain. Dengan demikian, kewargaan lebih pada persoalan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sedangkan budaya kewargaan lebih menekankan pada kesiapan untuk beradaptasi atau bertahan dalam interaksi sosial.

Sebaliknya budaya non-kewargaan (*incivility*) adalah ketidakpedulian dan ketegaan pada orang lain yang mengakibatkan suasana tidak menghargai, konflik dan stres. Secara umum, budaya non-kewargaan adalah penghinaan atas kehormatan dan martabat kemanusiaan. Schak (2009) juga menekankan bahwa budaya kewargaan lebih merefleksikan pandangan dunia tertentu yang disertai dengan perilaku di mana kita memperlakukan ruang publik dan sesama warga negara, khususnya yang tidak dikenal, berdasarkan standar nilai moral universal.

Kelas Menengah dan Agama

Kelas menengah diasumsikan sebagai status sosial warga masyarakat yang memiliki potensi besar mendorong terciptanya budaya kewargaan yang lebih baik. Kelas menengah bukan nominal satuan orang, tetapi merupakan kondisi pikiran dan mental yang ditopang oleh kapasitas ekonomi sehingga tercipta manusia-manusia yang memiliki aspirasi, selera, dan perilaku unik atau berbeda dari kelas bawah atau kelas atas.

Banerjee dan Duflo (2008) mengemukakan tiga tipologi karakter kelas menengah, yaitu (1). Sifat entrepreneurial sehingga mereka mampu menunda penerimaan gratifikasi; (2). Suka mengakumulasi modal sosial dan budaya, seperti pendidikan, dan gemar menabung; dan terakhir (3). Sifat konsumtif. Mereka mempertahankan kepentingan mereka dalam bentuk pembelaan terhadap modal, kontrak, properti, dan penegakan hukum sesuai dengan kondisi politik yang cenderung berubah-ubah (Robinson & Goodman, 1996).

Karakter dan kapasitas tersebut menyebabkan posisi kelas menengah banyak dipertimbangkan dalam berbagai bentuk proses transformasi sosial politik, seperti penguatan ekonomi dan demokrasi dalam sebuah bangsa dalam ranah publik. Dengan demikian, adalah logis mengharapkan peran yang sama dalam proses transformasi budaya kewargaan (*civility*) sebuah

bangsa. Namun demikian, banyak yang meragukan kemampuan kelas menengah Indonesia melakukan transformasi politik dan nilai kewargaan.

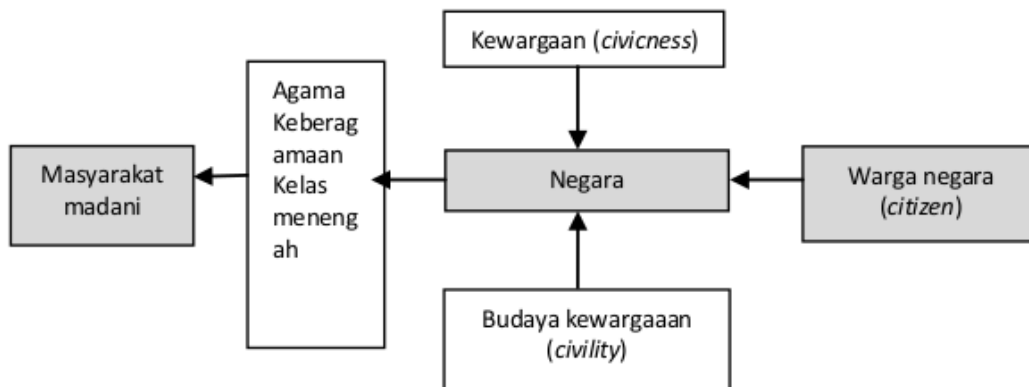
Budaya Kewargaan dan Masyarakat Madani

Karena mobilitas dan konektivitas manusia yang semakin tinggi, pluralitas masyarakat Indonesia semakin kompleks sehingga rakyat dituntut terbuka terhadap berbagai alternatif sosial politik yang ada di sekitarnya. Keterbukaan ini memerlukan pengetahuan dan sikap baru yang relevan dengan kompleksitas baru yang ada. Karena itu, setiap anggota masyarakat mesti memiliki kompetensi kewargaan (*civic competence*) dan kompetensi budaya kewargaan (*civil competence*) dalam menjalankan fungsi dan posisi politik dan budaya sebagai warga negara dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi tersebut diharapkan semakin mempertegas pola relasi antara warga dan negara, dan antara warga dan warga sehingga tatanan sosial dan budaya dapat diperkuat dan dipertahankan.

Negara dan bangsa yang ber peradaban adalah mereka yang memiliki sistem politik efektif serta memiliki rakyat yang berbudaya kewargaan tinggi. Masyarakat seperti itu biasa dikenal dengan masyarakat madani atau *civil society*. Agama, keberagamaan, dan warga kelas menengah Indonesia diasumsikan menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat yang layak menyandang predikat masyarakat madani (*civil society*).

Konsep pemikiran ini dapat digambarkan dalam diagram sebagaimana berikut:

Diagram 1:
Kerangka Pikir



Penelitian Terdahulu

1. *Kewargaan (Civicness) sebagai Modal Pembangunan Politik Bangsa*

Eksistensi sebuah komunitas politik yang kita kenal dengan negara-bangsa ditentukan oleh adanya pemerintah dan rakyat yang diperintah. Interaksi di antara keduanya memungkinkan terbentuknya sebuah negara, lalu dilanjutkan dengan pembangunan sebuah bangsa. Bukan hanya kepentingan yang memungkinkan terjadinya sinergi antara keduanya, tetapi norma budaya dan konsensus juga sangat menentukan dalam menjaga kesatuan bangsa (Bendix, 1977).

Dalam pandangan model kewarganegaraan rasioanalisis-aktivis, sebuah sistem demokrasi yang sukses memerlukan warga negara yang aktif, berpengaruh, dan berwawasan baik tentang politik. Namun demikian, harus diakui bahwa selalu ada ketimpangan antara tingkat persepsi yang tinggi soal pengaruh dengan pengaruh yang sesungguhnya, dan ketimpangan antara niat partisipasi dengan partisipasi yang sebenarnya. Untuk memperkecil ketimpangan itu, warga negara memerlukan pengalaman

kehidupan dalam masyarakat yang memiliki praktek kewargaan yang baik. Dengan demikian, mereka akan menemukan akses untuk komunikasi politik dalam kehidupan sehari-hari terbuka lebar (Almond & Verba, 1989).

Ada tiga model pemikiran yang mencoba menjelaskan faktor yang menentukan keberhasilan sebuah sistem politik demokratis. *Pertama*, pemikiran yang menekankan pada faktor desain institutional. Mereka berasumsi bahwa keberhasilan pemerintah menjalankan fungsi demokrasi ditentukan oleh kekuatan desain institusi politik sebuah negara. Desain institusi politik ini dapat secara langsung mengubah perilaku politik dan sosial budaya sebuah bangsa.

Kedua, pemikiran yang berpandangan bahwa kinerja sebuah pemerintahan bergantung pada faktor sosial ekonomi masyarakatnya. Artinya, kualitas praktek demokrasi sebuah bangsa bergantung pada tingkat kemajuan dan kesejahteraan ekonominya. *Ketiga*, model pemikiran yang berpandangan bahwa kinerja sebuah negara ditentukan oleh faktor-faktor sosial budaya (Rice & Sumberg, 1997). Artinya pola pikir, ide, konsep, dan perilaku yang baik berpengaruh secara langsung pada peningkatan efektivitas sistem politik dan sosial sebuah bangsa.

Putnam (1993) menjelaskan bahwa faktor-faktor sosial budaya yang membentuk kualitas kewargaan sebuah bangsa meliputi empat aspek, yaitu; (1). Partisipasi kewargaan; (2). Kesetaraan politik; (3). Solidaritas, kepercayaan, dan toleransi; dan (4). Struktur sosial yang menopang kerjasama.

Kajian-kajian ini menekankan pada peran kewargaan (*civicness*) pada penguatan sistem politik masyarakat dan negara sehingga hubungan antara masyarakat dan negara

dapat berjalan dengan baik. Tetapi, hubungan politik antara warga dan negara dalam tulisan ini diasumsikan sulit mencapai titik optimal tanpa budaya kewargaan (*civility*) yang baik.

2. *Budaya Kewargaan (Civility) sebagai Modal Pembentukan Masyarakat Madani*

Budaya kewargaan bukan lagi hanya sekedar kesopanan dan tingkah laku baik yang biasa digunakan untuk mendiskriminasi kelompok lemah yang dianggap masyarakat tidak beradab (*uncivilized*) (White, 2006). Budaya kewargaan dalam makna ini dilakukan banyak negara dalam proses pembentukan identitas homogen nasional rakyatnya.

Para ahli ilmu sosial dan politik telah menjadikan kebajikan-kebajikan budaya kewargaan (*virtues of civility*), seperti toleransi, non-diskriminasi, dan nalar publik sebagai seperangkat bentuk perilaku yang mendorong terciptanya sikap saling hormat dan peduli berdasarkan pada nalar guna membantu warga negara menangani konflik-konflik kehidupan umum. Telah terjadi pergeseran fungsi, dari fungsi diskriminasi ke fungsi solusi konflik. Jadi, budaya kewargaan merefleksikan keinginan kuat melakukan konsolidasi dan mengembalikan ekspektasi sosial, guna mencapai landasan yang sama menghadapi perbedaan sosial. Bukan lagi penciptaan kondisi yang menggoyang dan mengancam isi dari kewarganegaraan yang baik (*good citizenship*) (White, 2006).

Calhoun (2000) mengungkapkan bahwa meskipun isu budaya kewargaan (*civility*) semakin ramai dibicarakan di media dan percakapan sehari-hari sebagai faktor yang dapat meredam ketidaknyamanan interaksi antara warga, para pemikir cenderung meremehkan budaya kewargaan, bahkan sama sekali tidak menganggapnya sebagai bagian

dari kebajikan moral. Menurutnya, ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya sikap negatif ini.

Pertama, budaya kewargaan memiliki hubungan sangat kuat dengan etiket atau perilaku sopan. Padahal, aturan etiket sebenarnya tidak menguntungkan dan tidak pula menghargai orang. Karena itu, para ahli cenderung menghindari kajian serius tentang budaya kewargaan. *Kedua*, budaya kewargaan memiliki kedekatan dengan berbagai aturan sosial yang telah mapan, sehingga signifikansi dan relevansi pembahasannya tidak cukup tinggi. *Ketiga*, budaya kewargaan hanya satu bagian kecil dari sikap kebajikan dasar, atau hanya simbol dari sejumlah kebajikan, seperti toleransi, taat hukum, dan sejenisnya. Karena itu, pembicaraan soal budaya kewargaan dianggap parasit bagi pembicaraan tentang nilai kebajikan yang lebih besar dan mendasar.

Schak (2009) menjelaskan bahwa budaya kewargaan tidak dapat diperkuat di tengah-tengah masyarakat secara luas apabila negara menjadi polisi, pemerintahan tidak adil, warga selalu merasa terancam oleh tindakan kriminal, dan ada perpecahan etnis atau agama sehingga ada kelompok tertentu yang diperlakukan secara tidak beradab, bahkan biadab. Sebaliknya, budaya kewargaan ini dapat diperkuat apabila warga negara memiliki perasaan positif satu sama lain.

Dari kajian literatur tersebut dapat dipahami bahwa kualitas kewargaan sangat berperan menentukan nilai kemajuan pembangunan dan kemajuan sebuah bangsa. Artinya, dengan kualitas budaya kewargaan yang tinggi, kemajuan politik dan ekonomi sebuah bangsa menjadi semakin bermakna. Bangsa yang maju secara ekonomi dan politik, dan pada saat yang bersamaan memiliki warga negara yang berperilaku mulia, adalah bangsa yang berperadaban tinggi. Berperilaku mulia maksudnya

memiliki kemampuan bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai budaya kewargaan seperti integritas, etos kerja, dan solidaritas. Bahkan mungkin sebaliknya, nilai-nilai seperti itu akan memacu sebuah bangsa mencapai kesuksesan ekonomi dan politik lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan keberagamaan? Apakah agama memiliki peran penting dalam memajukan sebuah bangsa? Apakah keberagamaan dapat menopang peningkatan nilai-nilai kewargaan sebuah bangsa?

3. *Agama dan Keberagamaan sebagai Modal Penguatan Budaya Kewargaan*

Berkowitz and Lutterman (1968) mengungkapkan bahwa orang-orang yang taat pada nilai-nilai tradisi dan agama cenderung lebih bertanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari mereka. Temuan ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Alexis de Tocqueville (2000) tentang hubungan positif antara keberagamaan dan perkembangan demokrasi di Amerika Serikat.

Di masa sekarang, agama bukan lagi hanya sekedar penanda status dan media untuk melakukan akumulasi modal sosial, akan tetapi ia juga merupakan pintu utama memasuki berbagai bentuk partisipasi sosial (Lam, 2006), seperti organisasi sosial keagamaan. Dalam organisasi seperti itu, orang belajar mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kewargaan mereka. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam berbagai organisasi keagamaan membantu mereka menemukan dan menguatkan identitas kewargaannya (Lichterman, 2008). Penguatan identitas kewargaan akan mendorong terciptanya vitalitas partisipasi kewargaan, karena adanya kondisi kompetitif antara identitas yang berbeda sehingga mereka berlomba-lomba dalam kebaikan.

4. *Kelas Menengah sebagai Aktor Utama Penguatan Budaya Kewargaan dan Pembentukan Masyarakat Madani*

Kelas menengah adalah kategori sosial bagi anggota masyarakat yang memiliki kapasitas untuk membangun jaringan untuk kepentingan akumulasi modal sosial dan budaya yang dapat dikonversi ke dalam modal ekonomi (Bourdieu, 1986; Bourdieu & Passeron, 1990). Mereka mampu melakukan berbagai manuver politik untuk melindungi kepentingannya (Apple, 2004).

Embong (2002) dalam kasus Malaysia menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kemajuan demokrasi sebagaimana kesimpulan tesis Huntington (1991). Meskipun Singapura dan Malaysia, menurut Embong, telah mencapai kemajuan ekonomi yang lebih baik dari Indonesia dan Filipina, tetapi tatanan demokrasi mereka tidak lebih baik. Artinya, kemajuan ekonomi di Singapura dan Malaysia tidak mendorong peran kelas menengah dalam meningkatkan partisipasi politik mereka. Tetapi fenomena terakhir menunjukkan bahwa kelas menengah di Singapura maupun Malaysia semakin menunjukkan eksistensinya dalam mendorong partisipasi politik lebih besar bagi masyarakat sipil (Rodan, 2002).

Robison dan Goodman (1996) menegaskan bahwa fenomena kelahiran kelas menengah di Asia, termasuk Indonesia, tidak dapat disamakan dengan fenomena kelas menengah yang pernah ada di Eropa dan Amerika. Meskipun mereka sama-sama lahir dari sebuah perubahan industri, masing-masing memiliki keunikan. Kelas menengah Asia yang terbentuk dalam tiga dekade terakhir memiliki karakter non-liberal. Keberadaannya juga sulit dipisahkan dari negara.

Hasballah (1999), dalam kasus Indonesia, mengemukakan bahwa semakin meningkatnya keberadaan

kelas menengah Muslim, peran mereka dalam proses politik juga semakin kuat sehingga mereka mampu melakukan tawar-menawar politik dengan negara. Klinken dan Berenschot (2014) berpendapat bahwa setelah reformasi, meskipun dimulai dari atas, tetapi dalam prosesnya, kelas menengah dari daerah pinggiran yang memperjuangkan desentralisasi untuk melindungi kepentingan kelas mereka.

Goldfarb (1998) menegaskan bahwa intelektual, yang merupakan bagian terpenting dari fenomena kelas menengah, memiliki peran krusial dalam meningkatkan budaya kewargaan masyarakat. Mereka adalah warga negara yang diyakini mampu memprovokasi masyarakat untuk berpikir kritis melawan budaya non-kewargaan yang menghambat terciptanya suasana publik yang berkeadaban dan berperadaban. Artinya, adalah penting untuk mengidentifikasi kualitas kewargaan masyarakat beragama kelas menengah guna mengidentifikasi peran mereka dalam penguatan nilai-nilai budaya kewargaan berbasis sosial keagamaan.

Pembahasan

1. *Indeks Budaya Kewargaan di Sulawesi*

Pada penelitian ini ditemukan, bahwa tingkat budaya kewargaan masyarakat Muslim dan Kristen di Sulawesi cenderung pada tingkat sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, baik di kalangan masyarakat kelas menengah Muslim maupun Kristen.

Kemudian terdapat perbedaan tipis tingkat indeks budaya kewargaan antara responden yang beragama Islam dan beragama Kristen di Sulawesi. Dari mereka yang memiliki tingkat indeks budaya kewargaan dengan kategori rendah sebanyak 11,7 persen Muslim dan 15 persen Kristen, yang berada pada kategori sedang sebanyak

69,5 persen Muslim dan 66,8 persen Kristen dan terakhir pada kategori tinggi yaitu sebanyak 18,8 persen Muslim dan 18,2 persen Kristen.

2. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Budaya Kewargaan di Sulawesi*

Terdapat tiga faktor utama yang dapat membantu kita memprediksi tinggi rendahnya tingkat budaya kewargaan, sehingga kita dapat melakukan usaha-usaha mendorong penguatannya di masa-masa mendatang.

Pertama, tingkat keberagamaan. Rata-rata orang yang memiliki tingkat keberagamaan tinggi memiliki kecenderungan untuk berbudaya kewargaan yang lebih baik pula. Orang yang mengapresiasi bahwa agama itu penting dalam kehidupan sehari-hari dan selalu merasakan kehadiran Tuhan sebagai inti keberagamaan kaum Muslim dan Kristen cenderung menerjemahkan perasaan dan pikiran ini ke dalam ide dan sikap budaya kewargaan yang lebih baik.

Kedua, status kelas sosial menengah baru atau lama memiliki kemampuan untuk memprediksi apakah rata-rata orang atau masyarakat memiliki tingkat budaya kewargaan yang rendah atau tinggi. Mereka yang memiliki status kelas sosial menengah baru cenderung memiliki tingkat budaya kewargaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki status kelas menengah lama.

Ketiga, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan secara signifikan dapat memprediksi tinggi rendahnya tingkat budaya kewargaan rata-rata orang atau masyarakat. Mereka yang berpendidikan tinggi memiliki potensi atau kemungkinan lebih besar berbudaya kewargaan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

3. *Faktor-Faktor Pembeda Tingkat Budaya Kewargaan di Sulawesi*

Setelah menemukan faktor-faktor yang dapat memprediksi tinggi rendahnya tingkat budaya kewargaan di Sulawesi. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keberagamaan, agama, status kelas sosial, dan pendidikan memiliki efek atau dampak pada tingkat budaya kewargaan melalui interaksi satu dengan yang lain, yaitu; (1). Keberagamaan berinteraksi dengan pendidikan, (2). Pendidikan dan agama; (3). Keberagamaan dengan pendidikan dan agama, dan (4). Status kelas sosial dengan pendidikan dan agama.

Dari semua interaksi ini, pendidikan memainkan peran terpenting. Agama yang sebelumnya tidak memiliki dampak pada tingkat budaya kewargaan, setelah berinteraksi dengan pendidikan pun memberikan suatu dampak. Artinya, agama apa pun yang seseorang anut, apabila pendidikannya tinggi, maka tingkat budaya kewargaannya menjadi lebih baik.

Selain itu, status kelas sosial, yang tidak memiliki efek utama secara langsung saat dimasukkan dengan variabel agama, menunjukkan dampak signifikan pada tingkat budaya kewargaan setelah diinteraksikan dengan pendidikan dan agama. Artinya, status kelas sosial menengah apa pun yang dimiliki seseorang, lama atau baru, sepanjang dia berpendidikan tinggi maka dia akan lebih besar kemungkinan memiliki tingkat budaya kewargaan yang lebih tinggi.

Tingkat pendidikan, tingkat keberagamaan, dan status kelas sosial merupakan tiga faktor yang secara signifikan dapat memprediksi tingkat budaya kewargaan. Namun demikian, informasi ini belum dapat menunjukkan faktor-faktor pembeda utama dalam tingkat budaya kewargaan. Demikian juga halnya dengan keberagamaan. Dengan

demikian, pendidikan merupakan salah satu mekanisme utama yang menjadikan seseorang atau sebuah bangsa menjadi lebih berbudaya kewargaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata warga negara sebuah bangsa, maka semakin besar kemungkinan bangsa itu memiliki budaya kewargaan yang lebih berkualitas.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa agama tidak dapat diterjemahkan secara harfiah, statis, dan normatif dalam memahami dan menjelaskan pengaruh atau dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam budaya kewargaan kita yang meliputi budaya integritas, budaya etos kerja, dan budaya solidaritas. Kita tidak dapat, misalnya, mengatakan bahwa seseorang atau sebuah masyarakat berbudaya kewargaan rendah karena mereka menganut agama Islam atau agama Kristen. Seseorang atau sebuah masyarakat yang beragama, apapun agamanya, akan berbudaya kewargaan yang baik tergantung pada kualitas karakteristik yang dimilikinya. Pembangunan karakteristik orang atau bangsa, karena itu, sebaiknya dimulai dari sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa karakteristik orang atau masyarakat itu ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Orang yang berpendidikan, apapun kelas sosial dan agamanya, memiliki potensi untuk lebih rasional dan menggunakan akal sehat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cenderung memperhatikan norma-norma keadaban dan kemanusiaan dalam pola pikir dan tingkah lakunya.

Dari sisi kebijakan, penguatan budaya kewargaan lewat pendidikan sebaiknya diintegrasikan dengan program penguatan daya saing bangsa Indonesia. Budaya kewargaan sebaiknya tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang statis termaktub dalam kitab-kitas suci agama yang kita anut. Budaya kewargaan sebaiknya dikaji dalam konteks kebutuhan rakyat

Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing mereka di kancah lokal, regional, dan internasional.

Implikasi ekonomi dan politik sebuah budaya kewargaan perlu diteliti lebih jauh. Apakah masyarakat atau kelompok orang yang berbudaya kewargaan tinggi atau lebih baik benar-benar memiliki kesempatan politik dan ekonomi yang lebih baik dalam kehidupan kita? Kalau iya, bagaimana mekanisme kerja budaya kewargaan ini dalam membantu seseorang mendapatkan kesempatan politik atau ekonomi dalam kehidupannya sehari-harinya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga kesimpulan-kesimpulan yang diambil masih bersifat eksploratif, belum mencapai tahap konfirmatif. *Pertama*, *sampeling* dan besaran *sampelnya* masih perlu ditingkatkan. Karena keterbatasan waktu dan dana, *sampeling* dengan tingkat keacakan tinggi tidak dapat dilakukan. Jumlah sampel dari setiap kota masih kecil, yaitu sekitar 120 orang berdasarkan unit keluarga. *Kedua*, kelas menengah yang terjaring dalam sampel masih kurang konsisten dalam menunjukkan identitas kelas menengahnya. Artinya, perlu dilakukan penelitian yang lebih jelas dalam penentuan kriteria kelas menengah saat pengambilan sampel.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1989). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. New York: SAGE Publications.
- Apple, M. W. (2004). Creating Difference: Neo-Liberalism, Neo-Conservatism and the Politics of Educational Reform. *Educational Policy*, 18(1), 12-44.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2008). What is Middle Class about Classes around the World? the Middle. *The Journal of Economic Perspectives*, 22(2), 3-28.

Bendix, R. (1977). *Nation-Building and Citizenship*. Los Angeles, CA: University of California Press.

Berkowitz, L., & Lutterman, K. G. (1968). The Traditional Socially Responsible Personality. *Public Opinion Quarterly*, 32(2), 169-185.

Bourdieu, P. (1986). Forms of Capital *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241-258). New York: Greenwood Press.

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. New Yor: SAGE.

Calhoun, C. (2000). The Virtue of Civility. *Philosophy and Public Affairs*, 29(3), 251-275.

Dalton, R. J., & Welzel, C. (2014). *The Civic Culture Transformed: From Allegiant to Assertive Citizens*. Cambridge: Cambridge University Press.

Embong, A. R. (2002). *State-Led Modernization and the New Middle Class in Malaysia*. Gordonsville, VA, USA: Palgrave Macmillan.

Evers, A. (2009). Civicness and Civility: Their Meanings for Social Services. *Voluntas*, 20, 239-259.

Gerakan Nasional Revolusi Mental. (2015). Nilai-Nilai Strategis Revolusi Mental. Retrieved March 2, 2016, from <http://revolusimental.go.id/tentang-gerakan/nilai-nilai-strategis-revolusi-mental.html>

Goldfarb, J. C. (1998). *Civility and Subversion: The Intellectual in Democratic Society*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Gunsteren, H. v. (1998). *A Theory of Citizenship: Organizing Purality in Contemporary Democracies*. Colorado: Westview Press.

Hasballah, M. (1999). *The Making of Hegemony: Cultural Presentations of the Muslim Middle Class in Indonesia New Order Period*. (Masters of Arts), ANU, Camberra.

- Heryanto, A., & Mandal, S. K. (2003). *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia: Comparing Indonesia and Malaysia*. New York: RoutledgeCurzon.
- Inglehart, R. (1988). The Renaissance of Political Culture. *American Political Science Review*, 82(4), 1203-1230.
- Klinken, G. v., & Berenschot, W. (Eds.). (2014). *In Search of Middle Indoensia: Middle Classes in Provincial Towns*. Leiden: Brill.
- Koo, H. (1991). Middle Classes, Democratization, and Class Formation: the Case of South Korea. *Theory and Society*, 20(4), 485-509.
- Lam, P.-Y. (2006). Religion and Civic Culture: A Cross-National Study of Voluntary Association Membership. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 45(2), 177-193.
- Levitt, P. (2008). Religion as a Path to Civic Engagement. *Ethnic and Racial Studies*, 31(4), 766-791.
- Lichterhan, P. (2008). Religion and the Construction of Civic Identity. *American Sociological Review*, 73, 83-104.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meyer, M. J. (2000). Liberal Civility and the Civility of Etiquette: Public Ideals and Personal Lives. *Social Theory and Practice*, 26(1), 69-84.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Rice, T. W., & Sumberg, A. F. (1997). Civic Culture and Government Performance in the American States. *The Journal of Federalism*, 27(1), 99-114.
- Robinson, R., & Goodman, D. S. G. (1996). The new rich in Asia: Economic development, social status and political consciousness. In R. Robinson & D. S. G. Goodman (Eds.), *The New Rich in Asia: Mobile Phones, McDonald's and Middle-Class Revolution* (pp. 1-18). New York: Routledge.

Budaya Keluarga Masyarakat Kelas Menengah Muslim dan Kristen dalam Konteks...,

Robison, R. (1990). Problems of Analysing The Middle Class as A Political Force In Indonesia *The Politics of Middle Class Indonesia* (pp. 128-137). Victoria, Australia: Monash University.

Rodan, G. (2002). Authoritarian Rule and Transparency Reform: Malaysia and Singapore after the Economic Crisis *East Asia Capitalism: Conflicts, Growth and Crisis* (pp. 253-283).

Schak, D. C. (2009). The Development of Civility in Taiwan. *Pacific Affairs*, 82(3), 447-464.

The Economist. (2009). The Middle Class in Emerging Markets: Two Billion More Bourgeois. February 12. Retrieved February 28, 2012, from <http://www.economist.com/node/13109687>

Tocqueville, A. d. (2000). *Democracy in America*. London: Harper Perennial Modern Classics.

White, M. (2006). An Ambivalent Civility. *Canadian Journal of Sociology*, 31(4), 445-460.

Williams, R. H. (1996). Religion as Political Resource: Culture or Ideology? *Journal for the Scientific Study of Religion*, 35(4), 368-378.

Budaya Kewargaan

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

4%

★ id.123dok.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off